

## Peran Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MAN 1 Pringsewu

Achmad Dimas Cahyadin<sup>1</sup>, Ahmad Fauzan<sup>2</sup>, & Riyuzen Praja Tuala<sup>3</sup>

[dimascahyadin@gmail.com](mailto:dimascahyadin@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmad.fuzan@radenintan.ac.id](mailto:ahmad.fuzan@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>, & [riyuzen.tuala@gmail.com](mailto:riyuzen.tuala@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>123</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi tentang peran komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasa di MAN 1 Pringsewu. Peran komite sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung kegiatan layanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan pendidikan, penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tempat dalam penelitian ini di MAN 1 Pringsewu dan adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran komite Madrasa di MAN 1 Pringsewu sudah melakukan perannya dengan baik yaitu dengan cara komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, komite sekolah sebagai pendukung penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pringsewu berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Komite sekolah melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, komite sekolah sebagai penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

**Kata Kunci:** Peran, Komite, Madrasah, Manajemen

**Abstract:** This research is motivated by the role of the madrasah committee in implementing Madrasa-Based Management at MAN 1 Pringsewu. The role of the school committee in relation to improving the quality of education services is as a giver of consideration, support for education service activities, controller of education service activities, a liaison or hook of communication ropes between the community and the government. This study uses a qualitative descriptive method, the location in this study is at MAN 1 Pringsewu and the data sources used are primary data and secondary data and there are several techniques used in collecting data, namely observation, interviews, and documentation. In this study, the authors also use triangulation techniques sources and techniques. Based on the results of this study it can be concluded that the role of the Madrasa committee at MAN 1 Pringsewu has carried out its role well, namely by means of the school committee as a giver of consideration in every plan and program prepared by the school, the school committee as a supporter of implementing and improving the quality of education at MAN 1 Pringsewu in the form of financial support, energy, and mental support. The school committee exercises control over decision making and education planning in schools, the school committee acts as a liaison or hook of communication between the community and the government.

**Keywords:** Role, Committee, Madrasah, Management

### Pendahuluan

Dalam upaya reformasi pendidikan nasional melalui otonomi daerah, hubungan madrasah dengan masyarakat secara *education* dan *cultural* khususnya orang tua murid dan masyarakat sekitar madrasah juga perlu direformasi sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya

pada madrasah. Salah satunya adalah dengan membentuk komite madrasah atau majelis madrasah untuk memberdayakan orang tua murid dalam pendidikan. Keberadaan komite madrasah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite madrasah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat madrasah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite madrasah (Uno, 2007: 92).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdasmen) tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat madrasah adalah sebagai berikut 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakara masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu pendidikan (Undang-Undang RI Nomor 20, 2003: 109).

Berdasarkan tujuan tujuan tersebut, maka komite madrasah mempunyai peran dan fungsi. Peran yang dijalankan Komite Madrasah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, adalah sebagai berikut 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pendidikan 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 20, 2003: 110).

Keberadaan komite madrasah merupakan bagian dari pewujudan manajemen berbasis madrasah yang melibatkan berbagai komponen, termasuk

masyarakat dan wali murid. Peran komite madrasah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai badan “advisory agency (pemberi pertimbangan), suporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Sebagai institusi pendidikan peran komite sangat penting untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran dimadrasah. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran madrasah dalam pengelolaan madrasah agar menjadi efektif dan efisien kepala madrasah harus menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) (Barnawi dan Arifin, 2017: 11).

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas pada madrasah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua *stakeholder*-nya, madrasah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat

otonomistiknya tersebut akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratik, kreatif, dan inovatif serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri (*self reform*). Artinya, dalam konteks ini, madrasah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sebab keputusan akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses belajar mengajar dalam konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang utuh.

Adapun komponen yang didesentralisasikan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah komponen-komponen manajemen berbasis madrasah, hal yang paling penting dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah adalah manajemen terhadap komponen-komponen madrasah itu sendiri. Sedikitnya terhadap tujuh komponen madrasah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBM, yaitu 1) Manajemen kurikulum, 2) Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, 3) Manajemen keuangan dan pembiayaan, 4) Manajemen sarana dan prasarana, 5) Manajemen kesiswaan, 6) Manajemen peran serta masyarakat, dan 7) Manajemen layanan khusus (Mulyasa, 2004: 39).

Manajemen berbasis madrasah yang di terapkan di MAN 1 Pringsewu sudah

mengikuti standar MBM pada secara umum yang mana kepala madrasah mendorong partisipasi warga madrasah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti halnya membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan-bahan mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntunan kehidupan masyarakat, kepala madrasah melakukan perawatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, memberikan motivasi dan menghimpun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang berupa ide, gagasan, aspirasi, dana, tenaga, materi dan lain lain. Penerapan manajemen berbasis madrasah di MAN 1 Pringsewu yaitu meliputi : 1) Manajemen kurikulum, Kurikulum di MAN 1 Pringsewu menggunakan kurikulum 2013 dan dalam pengelolaannya sudah baik yang mana terdapat penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. 2) Manajemen pendidik dan tenaga pendidik, Kepala madrasah di MAN 1 Pringsewu sangat memperhatikan tenaga pendidik sehingga selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik agar selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya. 3) Manajemen kesiswaan. 4) Manajemen kesiswaan di MAN 1 Pringsewu meliputi osis, kepramukaan dan

ekstrakurikuler. Dan dalam penerimaan siswa-siswi baru terdapat dua tes yang harus dipenuhi, yaitu tes tertulis dan tes membaca alquran. 5) Manajemen keuangan dan pembiayaan, Sumber keuangan di MAN 1 Pringsewu terdapat dari 2 sumber yaitu Boss dan Komite. Pengelolaan komite dalam pembayaran dengan cara mengangsur menjadi 3x angsuran yaitu 50%, 35% dan 15%. 6) Manajemen sarana dan prasarana, Pengelolaan sarana dan prasarana di MAN 1 Pringsewu sudah baik karena selalu menjaga memelihara dan mengontrol sarana dan prasarana di madrasah. Dalam pengelolaannya terdapat tiga yang dikerjakan yaitu, skala prioritas, skala bukan prioritas dan isidental. 7) Manajemen hubungan masyarakat dengan madrasah, MAN 1 Pringsewu memiliki kegiatan humas yang sangat unik, menarik dan baik yang mana kegiatan itu sangat membutuhkan masyarakat dan langsung terjun ke masyarakat, yaitu kegiatan yang dilakukan humas MAN 1 Pringsewu adalah kegiatan PPM (Pengabdian pada masyarakat) yang dilaksanakan pada bulan ramadhan. Tugas siswa dalam kegiatan ini yaitu mengisi kultum di mushola/masjid, mengajar TPA, baksos dan lain-lain. 8) Manajemen layanan khusus MAN 1 Pringsewu sangat memperhatikan layanan

husus yang diberikan sekolah kepada siswa-siswinya, mulai dari toilet, perpustakaan, UKS, kantin dan layanan konseling.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiyono, 2010: 15). Tempat dalam penelitian ini di MAN 1 Pringsewu, Sumber data penelitian ini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis atau lisan (Arikunto, 2013: 172). Berdasarkan uraian diatas, menurut Lofland sumber data utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam sumber data terdiri atas dua macam, yaitu primer dan sekunder, dan ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik yang mana Menurut Lexy Moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data itu (Moeleong, 2014: 175). Triangulasi merupakan sintesis dan integrasi data dari berbagai sumber-sumber melalui pengumpulan, eksaminasi, perbandingan dan interpretasi. Dengan mengumpulkan dan membandingkan multiple data satu sama lain, triangulasi membantu meniadakan ancaman bagi setiap validitas dan rehabilitas data.

### **Pembahasan**

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 25 “Komite madrasah/madrasah adalah lembaga mandiri, yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas madrasah, serta tokoh masyarakat yang

peduli pendidikan” (Dirjenpendis Departemen Agama RI, 2010: 8) Dalam pengertian lain disebutkan “Komite madrasah adalah institusi yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan madrasah, maupun lembaga pemerintah lainnya. Walaupun komite madrasah dan madrasah memiliki kemandirian masing-masing, namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama” (Syukur, 2011: 89-90).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa Komite madrasah adalah badan mandiri yang berangotakan wali murid, komunitas madrasah dan tokoh masyarakat, yang hubungan keduanya tidak bersifat hirarkis, tetapi saling bekerja sama sebagai mitra dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan.

Komite madrasah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah merupakan tuntutan untuk lebih meningkatkan peran serta

keluarga dan masyarakat. Tuntutan tersebut lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007: 4). Terbentuknya komite madrasah tidak terlepas dari paradigma baru dunia pendidikan dewasa ini yang menekankan pola hubungan antara madrasah dan orang tua murid dalam kemitraan sejajar. Hubungan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa masing-masing pihak merasa berkepentingan terhadap peningkatan layanan pendidikan di madrasah. Komite madrasah sebagai mitra madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki peran sebagai berikut 1) Pemberi pertimbangan, 2) Badan Pendukung, 3) Badan Pengontrol 4) Mediator.

#### ***Pemberi pertimbangan (Supporting Agency)***

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan terhadap sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang mitra kerja bersama kepala sekolah yang dapat diajak musyawarah tentang masa depan sekolah. Dalam perannya sebagai badan pemberi pertimbangan atau nasihat, komite sekolah di MAN 1 Pringsewu

dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah) termasuk dalam rapat RAPBM. Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain SDM, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, komite sekolah berperan sebagai mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah. Menurut Hasbullah yaitu komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan yaitu untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan (Hasbullah, 2006: 89-90).

#### ***Badan Pendukung (Controlling Agency)***

Peran komite sebagai badan pendukung di MAN 1 Pringsewu bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan

pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidik. Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja namun lebih dari itu.

Dengan berperan sebagai supporting agency ini, Komite sekolah dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak dapat berperan sebagai mana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat luas. Menurut teori Sri Rerani Panjtastuti yang mengatakan dengan berperan sebagai supporting agency ini, Komite sekolah dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan (Pantjastuti, 2008: 85).

#### ***Badan Pengontrol (Controlling Agency)***

Peran komite sekolah di MAN 1 Pringsewu ini dalam hal



controlling agency yang bertindak sebagai pengawas atau pengontrol. Yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar mengajar, Dan juga dalam pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksana program disekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah memiliki peran dalam memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan kepada sekolah, serta memberikan dukungan, control, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan (Uno, 2011: 92).

### ***Mediator atau Penghubung***

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator memerlukan kecermatan

dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan, dalam operasionalnya, komite sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untuk dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tengah-tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat.

Komunikasi antar masyarakat dan sekolah sangatlah penting demi hasil pendidikan yang bermutu, karena pada dasarnya orangtua wali murid juga merupakan salah satu faktor pendorong siswa dalam melakukan pembelajarannya, untuk itu saya sebagai anggota komite sekolah selalu menjalin komunikasi kepada wali murid terkait perkembangan dan keluhan yang dialami oleh siswa yang kemudian hal itu akan menjadi masukan dan tolak ukur pihak sekolah dalam menerapkan proses pembelajaran dan pelayanan dalam pendidikan, yang saya



lakukan dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah atau pihak sekolah ialah dengan menyampaikan beberapa pendapat dari masyarakat yang kemudian saya sampaikan dengan pihak sekolah. Menurut teori E. Mulyasa bahwa peran komite sebagai mediator adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2009: 128).

## Kesimpulan

Memberikan pertimbangan dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh madrasah, misalnya dalam hal perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, seperti perbaikan ruang kelas, pengadaan alat peraga, pembangunan laboratorium, pembangunan ruang kelas. Selain itu, komite madrasah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBM, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat diperbantukan bagi pengembangan madrasah. Mendukung penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pringsewu berupa dukungan finansial,

tenaga, dan dukungan pikiran. Selain itu melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di madrasah bagi pelaksanaan program di madrasah komite madrasah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di madrasah yang dilihat dari mutu pendidikan. Menjadi mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak madrasah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan madrasah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah.

## Daftar Pustaka

- Barnawi dan Arifin. 2017. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syukur, Fatah. 2011. *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Uno, Hamzah B. 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Uno, Hamzah B. 2011. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada.
- Lexy J, Moeleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pantjastuti, Sri Rerani. 2008. *Komite Sekolah*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur penelitian suatau pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.